

Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Inklusi melalui Pendampingan Terstruktur (Perencanaan, Tindakan & Pengamatan, dan Refleksi)

Ediyanto¹, Asep Sunandar², Wiwik Dwi Hastuti³, Putri Kartika Ningsih⁴

^{1,2,3,4} Universitas Negeri Malang

E-mail: ediyanto@um.ac.id

Received:
20 Oktober 2021

Revised:
23 November 2021

Accepted:
30 November 2021

Abstract:

Teachers are an important factor in optimizing inclusive education in certain educational units. In addition to classroom teachers, special teachers are also needed who have broad insight and skills in implementing inclusive learning in the classroom. In addition, parental involvement in children's education is a driving and determining factor in the development of inclusive education. Starting from making decisions regarding school placement, to collaboration between the education unit and parents who have children with special needs. With limited understanding and acceptance of the existence of ABK, teachers need skills in learning for ABK. Educational backgrounds that do not provide provisions for special education cause almost all teachers to face problems in dealing with children with special needs. This Community Service Program is one solution in an effort to provide the skills needed by inclusive school teachers at Ma'arif Prison in the form of handling children with special needs and indirectly as a form of improving the quality of learning in the classroom. The results of the pre-test and post-test showed a significant increase in competence in the aspects of awareness, knowledge, and skills of the trainee teachers. The average pre-test score was 54.67, while the post-test average score was 80.56. These results indicate that there is an increase in the understanding of the Ma'arif LP teachers regarding the service framework for inclusive students or with special needs which consists of early detection, consultation, collaboration and counseling. During the mentoring, the participants gave positive feedback on the activities and hoped that further activities would be applicable in relation to the implementation of inclusive education in educational units.

Keywords: *inclusive education, ABK, Ma'arif*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Pendahuluan

Pendidikan merupakan bagian dari prioritas pembangunan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 sebelum maupun setelah diamandemen. Negara Kesatuan republic Indonesia menjamin setiap warga negara memiliki hak dan wajib untuk mengikuti pendidikan tingkat dasar dan untuk itu pemerintah

berkewajiban membiayainya dengan tanpa diskriminasi. Pada umumnya, penyelenggaraan pendidikan bisa diakses oleh setiap warga negara Indonesia. Namun demikian, masih banyak terdapat warga negara Indonesia yang belum mendapatkan kesempatan untuk dapat mengikuti proses pendidikan secara layak, khususnya bagi kategori anak ABK. Undang-undang No. 3 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Indonesia, mengatur bahwa bagi warga negara yang dinilai mempunyai kelainan fisik, mental, emosional, intelektual dan/atau secara sosial dan termasuk juga warga negara yang berada di daerah terpencil atau terbelakang termasuk masyarakat adat yang ada di daerah terpencil berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Keterbatasan pengetahuan dan penerimaan terhadap keberadaan siswa ABK, guru sudah tentu membutuhkan *skill* dalam pembelajaran bagi siswa ABK. *Background* pendidikan seorang guru yang tidak berasal dari pendidikan khusus menjadi factor penyebab bagi guru menghadapi permasalahan dalam menangani siswa ABK. Selain terbatasnya tingkat pemahaman, penerimaan guru terhadap keberadaan siswa ABK juga berpengaruh terhadap perilaku guru ke siswa tersebut. Sehingga tidak heran jika terdapat pandangan kurang baik yang tertuju pada siswa ABK. Penghargaan yang jarang dilakukan, rendahnya harapan, penolakan, sering ditujukan kepada anak ABK dibandingkan anak normal (Amin, Syafi, Fn, Ana, & Ekaningsih, 2018). Guru kelas reguler merasa banyak terbebani ketika menghadapi siswa dengan kebutuhan khusus yang tentunya membutuhkan perhatian dan waktu yang lebih banyak dibandingkan siswa lain dan cenderung tidak membuahkan hasil sesuai harapan. Oleh karena itu penanganan ABK sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan inklusi dalam suatu pembelajaran perlu untuk dilakukan. Selain bagi siswa ABK, upaya ini juga bermanfaat bagi siswa-siswa lainnya juga bisa belajar menghargai perbedaan dan keragaman potensi masing-masing.

Pendidikan inklusi menempatkan guru sebagai aktor utama yang paling menentukan situasi kelas. Guru diharapkan dapat mampu menerima, adaptasi serta mengembangkan strategi yang relevan dengan kondisi maupun kebutuhan siswa dalam belajar. Program ini berupaya fasilitasi kebutuhan guru dalam mendampingi siswa ABK tanpa mengorbankan siswa lainnya dengan kajian permasalahan terkait dengan individual diversity di dalam kelas. Melalui program ini diharapkan penanganan ABK dapat diwujudkan dalam berbagai alternatif fleksibilitas maupun modifikasi pembelajaran disertai dengan langkah-langkah

penerapan yang jelas. Selain itu, pendidikan yang berkualitas yang dapat tercermin dari pemberian program yang menjangkau semua anak supaya mereka dapat berkembang secara intelektual dan sosial secara maksimal, dan bukan pemberian program yang sama untuk semua anak (Dewi, 2016). Melalui pembelajaran ABK di kelas inklusif diharapkan salah satu keberagaman siswa di kelas dapat terjangkau.

Selama dasawarwa terakhir ini Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif mulai tingkat pusat sampai di daerah memiliki program kampanye pendidikan inklusi agar dapat diterapkan dengan baik di lingkungan sekolah di bawah naungan LP Ma'arif, termasuk LP Ma'arif Bangil Pasuruan yang baru mencanangkan program tersebut. Salah satu tokohnya adalah Kharisul Wathoni yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk dididik, tidak mengecualikan para difabel. Sayangnya, jumlahnya besar tetapi aksesnya kecil. Difabel mendapatkan akses yang terbatas termasuk akses pendidikan khususnya di lembaga pendidikan Islam, termasuk LP Ma'arif (Wathoni, 2013). Pernyataan tersebut menjadi pendorong LP Ma'arif untuk terus berupaya mewujudkan hak para difabel agar mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana manusia normal. Sehingga setiap sekolah khususnya LP Ma'arif Cabang Bangil ini membutuhkan mitra pendampingan baik dalam hal peningkatan kapasitas para guru maupun dalam hal penguatan kelembagaannya (Kristiana, 2015).

Secara umum potret kelambagaan pendidikan ma'arif bila dibandingkan dengan kelembagaan pendidikan lainnya merupakan satuan pendidikan formal yang diadaptasikan dengan pendidikan keagamaan tradisional di lingkungan Nahdlotul Ulama' (NU) yang telah mengakar di masyarakat. Terdapat anggapan bahwa madrasah atau satuan pendidikan yang berafiliasi di bawah naungan NU relevan bagi masyarakat di desa dari kalangan keluarga petani, buruh, nelayan, dan lain sebagainya. Animo semacam itu menjadi sebab adanya kesan diskriminasi terhadap institusi pendidikan ma'arif. Namun demikian, disisi lain hal tersebut menjadi motivasi tersendiri guna mendorong lahirnya gagasan-gagasan baru untuk mengembangkan institusi madrasah, sekolah, maupun pendidikan tinggi yang unggul dan berdaya saing. Banyaknya peserta didik dari masyarakat kalangan *grass root* menjadi bukti bahwa LP Ma'arif tetap konsisten dalam memperjuangkan harkat dan martabat masyarakat kelas bawah dibidang pendidikan.

Hingga saat ini LP Ma'arif NU telah menaungi sejumlah 20.136 satuan pendidikan termasuk madrasah di seluruh tanah air. Satuan pendidikan berupa sekolah sejumlah 7.462

atau 39%, dan madrasah 12.674 atau 61%. Secara keseluruhan jumlah lembaga pendidikan tersebut terdiri atas madrasah ibtidaiyah (MI), madrasah tsanawiyah (MTs), madrasah aliyah (MA), sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) dan juga sekolah menengah kejuruan (SMK). Sebagaimana referensi data kemendikbud bahwa dari 8 satuan pendidikan khusus di Kabupaten Pasuruan 5 diantaranya berada pada kawasan Bangil dan sekitarnya. Karasidenan Bangil meliputi Kecamatan Bangil, Rembang, Beji, Gempol, Pandaan, dan Prigen. Dari 332 jumlah satuan pendidikan dasar dan menengah yang ada di wilayah karasidenan Bangil Kabupaten Pasuruan, 68% diantaranya merupakan satuan pendidikan di bawah naungan LP Ma'arif Bangil.

Program pengabdian masyarakat ini merupakan salah satu alternative solusi dalam upaya meningkatkan kemampuan para guru sekolah ma'arif dalam penanganan siswa ABK di sekolah inklusi. Selain itu secara tidak langsung sebagai bentuk peningkatan kualitas pembelajaran di kelas bagi satuan pendidikan yang memiliki siswa ABK melalui pelatihan, workshop dan pendampingan bagi para guru ma'arif tentang pendidikan inklusi bagi siswa ABK. Adapun yang menjadi target kegiatan ini adalah adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan guru ma'arif dalam menerapkan model sekolah inklusi di satuan mendidikan masing-masing.

Metode

Program pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan sistem pendampingan dengan metode *community development* dengan rangkaian kegiatan, yakni; 1) Workshop pengembangan *skill* pendidikan inklusi, 2) Workshop pengembangan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), 3) *Parenting* bagi orang tua siswa ABK, dan 4) Pendampingan berkala bagi guru (Indrianto & Rochma, 2020). Pada situasi pandemic covid-19 sehingga kegiatan-kegiatan dalam program kemitraan masyarakat ini akan dilaksanakan secara daring melalui *online meeting*. Namun demikian, sebelum workshop atau pelatihan para guru diberikan pre tes mengenai model pendidikan inklusi dan pengembangan kurikulum dan setelah kegiatan selesai dilaksanakan para guru diberikan pos tes untuk mengukur dan mengetahui ketercapaian indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan (Tyas, Sunarto, & Naibaho, 2018). Adapun rangkaian program secara rinci terbagi dalam empat tahap sebagai berikut:

1. Perencanaan

Pada tahapan perencanaan dilakukan identifikasi masalah yakni kurangnya kemampuan guru ma'arif dalam pembelajaran bagi ABK di sekolah dan penetapan alternatif pemecahan masalah yaitu dengan pelatihan pembelajaran ABK dalam *setting* sekolah inklusi, kemudian dilakukan hal-hal antara lain: (a) Merencanakan pelatihan yang akan diterapkan dalam tindakan, (b) Menentukan pokok bahasan materi pelatihan, (c) Mengembangkan skenario tindakan pelatihan, dan (d) Menyusun Lembar Kerja Guru (LKG).

2. Tindakan dan Pengamatan

Tahapan ini mengacu pada skenario yang telah disusun dan LKG, sekaligus melakukan pengamatan sebagai berikut: (a) Sebelum 'tindakan', terlebih dahulu dilakukan pre-tes baik pada guru reguler maupun pada guru khusus/pembimbing khusus sekolah inklusi mengenai pelaksanaan pendidikan inklusi, dan (b) Setelah dilakukan 'tindakan' (pelatihan dan workshop) diberikan post-tes pada para guru inklusi mengenai pemahaman pelaksanaan pendidikan inklusi.

3. Refleksi

Pada tahapan ini akan dilakukan serangkaian evaluasi untuk merefleksikan kondisi existing di lembaga pendidikan masing-masing dengan penjelasan berikut: (a) Melakukan evaluasi terhadap tahapan 'tindakan' yang telah dilakukan yakni berupa pelatihan dan workshop bagi para guru mengenai pelaksanaan pendidikan inklusi, (b) Melakukan pertemuan dengan kepala sekolah/mitra untuk membahas hasil evaluasi dari 'tindakan' bagi guru tentang pelaksanaan pendidikan inklusi di sekolah, (c) Melakukan perbaikan atas pelaksanaan 'tindakan' sesuai dengan hasil evaluasi, untuk digunakan pada 'tindakan' selanjutnya, dan (d) Evaluasi 'tindakan'.

Hasil dan Diskusi

1. Perencanaan

Perencanaan dibuat berdasarkan hasil analisis situasi target group yaitu guru-guru sekolah inklusi di lingkungan LP Ma'arif Bangil Pasuruan melalui diskusi bersama dengan HUMANIST Center sebagai mitra. Hasil diskusi menunjukkan bahwa target group masih

kurang memahami kerangka pendidikan inklusi baik secara konseptual maupun terapannya khususnya bagi siswa-siswi berkebutuhan khusus.

2. Tindakan dan Pengamatan

a. Penyusunan Modul Pelatihan

Penyusunan modul dilakukan untuk menjadi materi pelatihan peningkatan kapasitas guru inklusi sebagai sasaran program. Modul-modul yang disusun antara lain:

- 1) Landasan dan Konsep Pendidikan Inklusi: Program Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Inklusi (Ediyanto, Sunandar, Hastuti, & Ramadhani, 2021).
- 2) Manajemen Pendidikan Inklusi: Program Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Inklusi (Ediyanto, Sunandar, & Fitrasari, 2021).
- 3) Identifikasi dan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus: Program Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Inklusi (Ediyanto, Hastuti, & Rizqianti, 2021).
- 4) Pengembangan Kurikulum, Silabus dan RPP di Sekolah Inklusi: Program Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Inklusi (Ediyanto, Sunandar, & Iswahyudi, 2021).
- 5) Pengembangan Sarana Prasarana dan Media Pembelajaran: Program Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Inklusi (Ediyanto, Hastuti, & Lailiyah, 2021).

b. Pendampingan Peningkatan Kompetensi Guru Inklusi

Pendampingan peningkatan kompetensi guru inklusi ini awalnya direncanakan akan dilaksanakan dalam bentuk pelatihan secara luring di salah satu lembaga pendidikan ma'arif Bangil Pasuruan. Namun demikian, karena kondisi pandemi covid 19, sehingga tim pelaksana program pengabdian masyarakat bersama dengan mitra bersepakat untuk menganulir pelaksanaan kegiatan pelatihan menjadi webinar dengan system daring (Kesehatan et al., 2021). Kegiatan webinar ini dihadiri oleh 40 orang guru sekolah luar biasa dan inklusi. Kegiatan Webinar ini diselenggarakan pada tanggal 7 dan 14 Agustus 2021 pukul 08.00-15.00 WIB, melalui *Google Meeting*. Kegiatan webinar ini dilakukan untuk memberikan bekal awal mereka dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di lembaga pendidikan masing-masing. Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru Inklusi.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Peningkatan Kompetensi Guru Inklusi

Intisari dari proses pelaksanaan workshop dan pelatihan peningkatan kapasitas guru pendidikan inklusi adalah sebagai berikut:

- 1) Dr. Asep Sunandar, S.Pd, M.AP, sebagai KPs S2 PLB Universitas Negeri Malang menjelaskan bahwa hak anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak harus didukung dengan keterampilan para guru yang kompeten khususnya dibidang pendidikan inklusi. Sehingga melalui workshop dan pelatihan ini para guru sebagai peserta yang merupakan pendidik di satuan pendidikan inklusi akan difasilitasi dengan modul-modul pendidikan inklusi. Diharapkan modul-modul tersebut dapat menjadi kerangka acuan dalam penerapan di satuan pendidikan masing-masing. Selain itu, melalui forum ini para guru juga dapat berkonsultasi dan berdiskusi dengan para pakar yang menjadi narasumber dan kepada fasilitator yang ditugaskan.
- 2) Ediyanto, M.Pd., Ph.D sebagai pakar pendidikan inklusi menjelaskan bahwa Republik Indonesia sebenarnya telah memiliki regulasi untuk menjawab permasalahan-permasalahan pendidikan inklusi. Namun demikian, hasil yang dicapai juga bergantung pada kesiapan satuan pendidikan menjadi sekolah inklusi. Secara praktis sebagai sekolah inklusi sederhananya hanya perlu memodifikasi kurikulum yang terintegrasi agar dapat lebih terbuka tanpa membatasi kesempatan bagi siswa berkebutuhan khusus.
- 3) Dr. Wiwik Dwi Hastuti, S.Pd., M.Pd menjelaskan bahwa para guru sekolah inklusi direkomendasikan agar dapat memanfaatkan media pembelajaran yang telah ter-

digitalisasi dan relevan dengan kebutuhan untuk mendidik para siswa inklusi guna memudahkan proses pembelajaran di dalam kelas.

Diskusi dalam workshop dan pelatihan ini diawali oleh Deby Okta Harisanty (salah satu peserta), yakni terkait dengan adanya kasus penolakan dari satuan pendidikan terhadap calon siswa baru berkebutuhan khusus. Setiap narasumber merespon pertanyaan ini dengan memberikan dasar-dasar normatif untuk melindungi hak-hak atas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Kasus lain diungkapkan oleh Ibu Ida RA. (salah satu peserta), bahwa di sebuah satuan pendidikan sangat terbuka bagi siswa berkebutuhan khusus walaupun dalam konteks sarana prasarana pendidikan belum memadai. Untuk kasus tersebut, institusi satuan pendidikan direkomendasikan untuk menjadikan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan berbasis inklusi supaya menjadi prioritas, agar mendapatkan keterdukungan biaya dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan bagi siswa ABK. Adapun ketentuan dan kriteria-kriteria yang menjadi prasyarat sebagai sekolah inklusi telah dimuat dalam modul pelatihan ini. Diharapkan dapat menjadi rujukan dalam upaya pemenuhan standar mutu pendidikan inklusi yang ideal bagi satuan pendidikan para peserta pelatihan. Selanjutnya di sesi akhir para peserta (guru) dibekali dengan keterampilan dengan praktek dan *assessment* untuk penerapan di sekolah masing-masing.

Kegiatan tersebut dipublikasikan di media massa dengan tajuk “Tingkatkan Kompetensi Guru Inklusi, LP2M Universitas Negeri Malang Gelar Pelatihan Bersama HUMANIST Center” dengan link: <https://notula.humanist-center.org/2021/08/07/kompetensi-guru-inklusi-humanist/>.

c. Hasil Perbandingan Pre Test dan Post Test

Berikut merupakan hasil perbandingan pre-test dan post-test peserta pelatihan peningkatan kapasitas guru pendidikan inklusi.

Tabel 1. Perbandingan hasil Pre-Test dan Post-Test

Pair 1	Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pre Test	54.67	60	13.5	1.64
Post Test	80.56	60	11.3	1.36

Kesimpulan

Sebagaimana hasil pelaksanaan program pengabdian masyarakat yang telah di deskripsikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa secara praktis sekolah inklusi hanya perlu melakukan modifikasi kurikulum yang terintegrasi dengan kebutuhan siswa ABK agar dapat lebih terbuka tanpa membatasi kesempatan bagi siswa inklusi. Selain itu, para guru inklusi dapat memanfaatkan media pembelajaran terutama yang sudah ter-digitalisasi dan relevan khusus untuk para siswa inklusi guna memudahkan proses pembelajaran di dalam kelas. Sebagaimana ditunjukkan pada table perbandingan hasil pre-test dan post-tes bahwa terdapat perubahan yang signifikan bagi para guru yang mengikuti program peningkatan kapasitas guru sekolah inklusi ini, dimana nilai rata-rata sebelum kegiatan (pre-test) < 60, yakni 54,67. Sementara itu, nilai rata-rata setelah mengikuti kegiatan (post-test) > 60, yakni 80,56.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada LP2M Universitas Negeri Malang sebagai penanggungjawab program pengabdian kepada masyarakat ini. Selanjutnya kepada HUMANIST Center dan LP Ma'arif Bangil Pasuruan sebagai mitra dalam sukses pelaksanaan program.

Daftar Referensi

- Amin, M., Syafi, A., Fn, A. A., Ana, L., & Ekaningsih, F. (2018). *Pendampingan Guru Inklusi melalui Kegiatan Capacity Building sebagai Upaya Peningkatan Layanan Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus di Madrasah Ibtidaiyah*. 2(1), 80–98.
- Dewi, N. K. (2016). *MANFAAT PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSI UNTUK AUD*. 6(1).
- Ediyanto, E., Hastuti, W. D., & Lailiyah, N. (2021). Pengembangan Sarana Prasarana dan Media Pembelajaran: Program Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Inklusi. *Yayasan Pusat Pendidikan Angstrom*, 1(1 SE-Educational Book), 1–35. Retrieved from <https://educationcenter.id/ace-press/index.php/ojs/article/view/10>
- Ediyanto, E., Hastuti, W. D., & Rizqianti, N. A. (2021). Identifikasi dan Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus: Program Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Inklusi. *Yayasan Pusat Pendidikan Angstrom*, 1(1 SE-Educational Book), 1–63. Retrieved from

<https://educationcenter.id/ace-press/index.php/ojs/article/view/8>

Ediyanto, E., Sunandar, A., & Fitrasari, B. D. (2021). Manajemen Pendidikan Inklusi: Program Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Inklusi. *Yayasan Pusat Pendidikan Angstrom, 1*(1 SE-Educational Book), 1–58. Retrieved from <https://educationcenter.id/ace-press/index.php/ojs/article/view/7>

Ediyanto, E., Sunandar, A., Hastuti, W. D., & Ramadhani, R. S. (2021). Landasan dan Konsep Pendidikan Inklusi: Program Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Inklusi. *Yayasan Pusat Pendidikan Angstrom, 1*(1 SE-Educational Book), 1–55. Retrieved from <https://educationcenter.id/ace-press/index.php/ojs/article/view/6>

Ediyanto, E., Sunandar, A., & Iswahyudi, S. R. (2021). Pengembangan Kurikulum, Silabus dan RPP di Sekolah Inklusi: Program Peningkatan Kompetensi Guru Sekolah Inklusi. *Yayasan Pusat Pendidikan Angstrom, 1*(1 SE-Educational Book), 1–84. Retrieved from <https://educationcenter.id/ace-press/index.php/ojs/article/view/9>

Indrianto, N., & Rochma, I. N. (2020). KOLABORASI ANTAR GURU DALAM PELAKSANAAN PEMBELAJARAN DI SEKOLAH DASAR ISLAM INKLUSI TEACHER COLLABORATION IN IMPLEMENTING THE LEARNING PROCESS AT INCLUSIVE ISLAMIC ELEMENTARY. *7*(2), 165–175.

Kesehatan, M., Menteri, D. A. N., Negeri, D., Kesehatan, M., Menteri, D. A. N., & Negeri, D. (2021). KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, MENTERI AGAMA, MENTERI KESEHATAN, DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA (p. 7). p. 7.

Kristiana, I. F. (2015). SIKAP ORANG TUA DAN GURU TERHADAP IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSI DI PAUD. *Jurnal Ilmia Pendidikan, 21*(2), 145–150.

Tyas, E. H., Sunarto, S., & Naibaho, L. (2018). Evaluasi Implementasi Pembelajaran Students Centered Learning Oleh Mahasiswa Ppl Fkip-Uki Di Sekolah Mitra “Pskd. *Jurnal Selaras : Kajian Bimbingan Dan Konseling Serta Psikologi Pendidikan, 1*(1), 69–80. <https://doi.org/10.33541/sel.v1i1.775>

Wathoni, K. (2013). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSI DALAM PENDIDIKAN ISLAM. (156).